

INDONESIA MENUJU MASA DEPAN

Oleh Nurcholish Madjid

Lengsernya Pak Harto beserta Orde Barunya telah meninggalkan warisan yang memudahkan dan sekaligus menyulitkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah kita bicarakan keberhasilan Pak Harto dan Orde Barunya dalam bidang pembangunan fisik. Dalam hal fasilitas yang dihasilkannya, bangsa Indonesia memperoleh kemudahan relatif dalam kehidupannya. Tetapi, di sisi lain, kemudahan relatif itu juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang merusak, seperti tersedianya dana untuk dikorupsi dan digunakan secara tidak benar. Di masa Bung Karno dan Orde Lamanya korupsi juga terjadi, namun dengan efek perusakan langsung yang relatif kecil, karena volume absolut korupsi itu juga kecil. Di masa Pak Harto efek merusak dari korupsi itu menjadi berlipat ganda, sebanding dengan volume absolut dan relatif yang sangat besar berlipat ganda pula.

Hambatan Membangun Kembali Negara

Ibarat sebuah bangunan yang telah runtuh menjadi rata dengan tanah, berakhirnya sistem Pak Harto memudahkan bangsa Indonesia untuk membangun kembali negaranya dengan lebih bebas. Tetapi puing-puing yang menggungung itu ternyata tidak gampang menyingkirkannya dari lahan tempat bangunan baru yang akan didirikan, apalagi banyak pihak yang masih memanfaatkannya

dan bermaksud untuk memanfaatkan terus karena tidak mampu melihat kemungkinan mendirikan bangunan baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan fondasi yang dahulu telah dirancang oleh para pendiri negara. Maka, secara metaforik, membersihkan unsur-unsur sisa sistem Orde Baru menjadi amat sulit, karena harus menangani tumpukan puing yang menggunung dan menghadapi penghuni-penghuni liar baru yang masih bertahan hendak memanfaatkannya. Karena itu, sebagaimana telah dikemukakan di depan, mutlak diperlukan adanya peneguhan kembali komitmen dan pembaruan tekad bersama, dalam semangat persatuan dari Bung Karno, “*samen bundeling van alle krachten van de natie*”, “pengikatan bersama seluruh kekuatan bangsa”.

Berbagai pikiran terbaik tentang bangsa dan negara telah diletakkan oleh para bapak pendiri. Tetapi sampai sekarang pikiran-pikiran itu belum seluruhnya terwujudkan dalam kenyataan. Sebagian kecil yang telah terwujudkan, seperti persatuan seluruh tanah air, terancam untuk mengalami pembatalan karena ulah kita sendiri yang tidak memberi perhatian memadai kepada pikiran-pikiran selain masalah persatuan, seperti pikiran tentang kerakyatan dan keadilan sosial. Mengabaikan aspirasi rakyat dengan kekuasaan otoriter telah mendorong mereka kepada sikap-sikap tidak mau ikut bertanggung jawab atas keadaan bangsa dan negara. Mereka kehilangan rasa ikut punya dan ikut serta, menjadi apatis, tidak peduli. Pemerintahan otoriter selama berpuluh-puluh tahun, yang menghalangi warga negara untuk dengan bebas menyatakan pikiran, berkumpul dan berserikat, telah mematikan sisa-sisa kemampuan mengambil inisiatif dari bawah. Karena pendekatan-pendekatan penyelesaian masalah bangsa dan negara yang selalu berpola dari atas ke bawah (*top-down*), rakyat menjadi pasif, hanya bersikap menunggu apa yang bakal terjadi dari atas. Korelasi pendekatan serba dari atas ke bawah ialah kuatnya sentralisme, yang mendorong terjadinya ketimpangan antara pusat dan daerah. Disertai sikap-sikap tidak adil yang cukup mencolok berkenaan dengan pembagian kembali kekayaan nasional, efek negatif sentralisme menjadi salah satu sebab munculnya berbagai gejolak daerah.

Dalam hal pembagian kembali kekayaan nasional itu dan pemerataannya antara seluruh warga negara, konon kita termasuk beberapa negara yang paling tidak adil di muka bumi. Lepas dari benar atau tidaknya penilaian itu, namun jelas bahwa negara kita telah berkembang menjadi negara yang sangat timpang, secara diametral berlawanan dengan cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bangsa yang melawan prinsipnya sendiri tidak akan lama bertahan! Keadilan dan keseimbangan (*al-mîzân*) adalah hukum jagad raya, dan manusia dipesan jangan sampai melanggar keadilan dan keseimbangan, biar pun dalam bidang kehidupan yang sekecil-kecilnya. Sebab, melanggar keadilan dan keseimbangan adalah tindakan melawan hukum kosmos, sehingga bencana yang diakibatkan pun akan berdimensi kosmis, bersifat menyeluruh. Hukum keadilan dan keseimbangan adalah hukum alam dari Tuhan yang beroperasi tanpa tergantung kepada keinginan manusia (*objective*) dan tidak bisa diubah (*immutable*). Maka negeri yang adil dan berkeimbangan akan tegak berdiri, dan negeri yang tidak adil dan tidak berkeimbangan akan runtuh, lepas dari soal siapa dan apa agama penduduknya.

Masalah Korupsi dan Ketuhanan

Berkenaan dengan hal ini, maka sebagai bangsa yang bagian terbesar dari penduduknya adalah kaum Muslim, kita tidak dibenarkan bersandar hanya kepada kenyataan statistik jumlah penganut Islam. Justru, sejalan dengan hukum "*corruptio optimi pessima*" ("kejahatan oleh orang baik adalah kejahatan yang terburuk", "*corruption by the best is the worst*"), maka pelanggaran prinsip keadilan dan keseimbangan oleh kaum Muslim akan mendatangkan malapetaka berlipat ganda. Hukum yang sama berlaku atas para penganut setiap agama, sebab setiap agama juga mengajarkan prinsip yang sama. Karena itu para penganut setiap agama dituntut untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya ajaran Tuhan dalam masing-

masing agama itu. Tidak melaksanakan ajaran Allah dalam masing-masing agama itu adalah kekafiran, kezaliman, dan kefasikan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, inti pokok tugas suci para nabi ialah pembebasan manusia dari perbudakan oleh sesamanya dengan memusatkan penghambaan diri dan pengabdian mutlak hanya kepada Tuhan Yang Mahaesa, diikuti dengan perlawanan kepada tirani, dan dengan menegakkan keadilan dan keseimbangan (*balance*). Perlawanan terhadap tirani dan keimanan kepada Tuhan adalah pegangan hidup yang kukuh, suatu kebenaran yang jelas berbeda dari kepalsuan, dan manusia dipersilakan dengan bebas untuk memilih sendiri, sehingga tidak boleh ada paksaan dalam agama. Sebab tindakan memaksa itu sendiri adalah tindakan tiranik. Sistem demokratis adalah antitesa dari sistem tiranik, dengan dimensi metafisis pembebasan manusia dari penghambaan kepada sesamanya berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Untuk Indonesia, jalan pikiran di atas dianut oleh Bung Hatta, salah seorang tokoh pendiri bangsa yang berpandangan paling baik mengenai kenegaraan. Menurut Bung Hatta, semua kegiatan kenegaraan harus berlangsung di bawah sinar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama itu menyinari empat sila yang lain dalam Pancasila. Dengan begitu kegiatan kenegaraan kita memiliki dasar metafisis, sehingga menghasilkan komitmen yang total, yang tumbuh dari kesadaran bahwa semua perbuatan dan tingkah laku manusia adalah bermakna, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan banyak bidang kehidupan lain, pandangan itu sebenarnya telah disadari juga oleh sebagian kalangan pemerintah. Pak Harto, misalnya, menetapkan semacam ketentuan bahwa para pejabat negara harus bertakwa kepada Tuhan. Kecuali bahwa takwa seseorang adalah rahasia Allah yang tidak dapat diukur dengan angka dan tidak dapat diuji sesama manusia, penetapan ketentuan itu dapat dibenarkan jika diartikan bahwa para pejabat negara harus melaksanakan tugas kewajibannya dalam semangat kesadaran Ketuhanan sebagai sikap kejiwaan pribadinya yang tersimpan dalam rahasia lubuk hatinya.

Sesuai dengan petunjuk agama bahwa asas hidup yang benar, termasuk hidup kenegaraan, ialah takwa dan rida Allah, ketentuan petugas negara harus bertakwa berarti bahwa semua tindakan melaksanakan kewajiban kenegaraan harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan hadir dalam setiap kegiatan. Tuhan mengetahui, mengawasi, dan akan meminta pertanggungjawaban setiap noktah tindakan dan perilakunya serta dampak-dampaknya. Dengan kesadaran itu, seseorang akan terbimbing ke arah budi pekerti luhur atau akhlak mulia, prasyarat bagi kebahagiaan lahir dan batin. Budi pekerti luhur adalah salah satu wujud kedirian manusia yang paling tinggi. Di hadapan budi pekerti luhur semua kekuatan, baik fisik maupun mental, juga kekuasaan, tidak akan berdaya: “*Suro-diro jayaningrat lebur dening pangastuti*”, “kekuatan jiwa-raga dan kekuasaan lebur oleh budi pekerti luhur”.

Dalam hal itu kita melihat banyak orang dari berbagai kalangan di antara kita yang menunjukkan kesenjangan antara yang diucapkan dan yang dikerjakan. Tidak saja kita secara formal menganut suatu agama yang mengajarkan takwa, bahkan banyak dari kita yang merasa, atau mengaku, telah bertakwa kepada Tuhan, namun bertingkah laku seolah-olah tidak ada Tuhan, suatu bentuk kekafiran yang nyata! Karena itu kemudian kita menampilkan diri sebagai orang yang fasik (*fâsiq*), bertingkah laku tanpa peduli kepada ukuran-ukuran moral, *al-akhlâq al-karîmah* atau budi pekerti luhur. Sekali lagi, itu semua merupakan contoh “*corruption optimi pessima*”.

Dari sudut pandang itulah muncul salah satu alasan penilaian bahwa kita sedang mengalami kemerosotan moral di antara kita. Seperti dengan jelas dikemukakan Gibbon berkenaan dengan runtuhnya kekaisaran Romawi, kemerosotan moral adalah penyebab hancurnya bangsa-bangsa di dunia. Karena itu bangsa kita, dalam perjalanannya menuju masa depan, sangat memerlukan tindakan penyelamatan penuh kesungguhan, khususnya dalam usaha menegakkan standar moral yang setinggi-tingginya.

Indonesia sebagai “Soft State”

Sudah lama Karl Gunnar Myrdal (1898-1987) menilai negara kita sebagai “*soft state*”, “negara lunak”, yaitu negara yang pemerintahan dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang jelas, khususnya moral sosial-politik. Kita umumnya mengidap kelembekan (*leniency*), sikap serba memudahkan (*easy going*), sehingga tidak memiliki kepekaan cukup terhadap masalah penyelewengan dan kejahatan seperti korupsi, lebih-lebih korupsi dalam bentuk *conflict of interest*. Maka usaha menegakkan standar moral merupakan salah satu urgensi bagi bangsa kita. Sekali lagi lemahnya standar moral inilah yang menyebabkan kita sekarang mengalami krisis multidimensional, tidak semata-mata krisis finansial-moneter seperti kebanyakan negara tetangga kita. Akibatnya, krisis terus berlanjut, sementara negara-negara tetangga telah berhasil mengatasinya. Louis Kraar, seorang pengamat negara-negara industri baru di Asia Timur, pada tahun 1988 sudah meramalkan bahwa Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun akan menjadi halaman belakang (*back yard*) Asia Timur, ditinggalkan oleh negara-negara tetangga yang berkembang menjadi negara-negara maju. Sebabnya ialah etos kerja yang lembek dan korupsi yang gawat (*lousy work ethics and serious corruption*).

Kiranya tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa saat-saat ini gejala negara kita sebagai “halaman belakang” Asia Timur itu sudah mulai tampak. Indonesia semakin jauh tertinggal oleh tetangga-tetangganya di *Pacific Rims*. Maka ungkapan “krisis multidimensional” memang merupakan gambaran tentang kerusakan bangsa dan negara yang menyeluruh. Kerusakan yang dimulai dengan krisis finansial moneter itu, seperti pada banyak negara yang juga mengalaminya, seharusnya dapat dibatasi hanya sebagai krisis pada suatu bagian tertentu dari ekonomi nasional. Tetapi ternyata sumbernya tidak hanya ada dalam bidang finansial-moneter semata, melainkan dalam pengelolaan yang lemah (*weak governance*) dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan, sehingga krisis tersebut merambah dan meliputi semua segi kehidupan bangsa. [❖]